



Tiga SKPD Kota Jadi Pilot Project Nasional

JOGJA - Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Kota Jogja ditunjuk sebagai pilot project (proyek percontohan) nasional. Tiga SKPD tersebut, antara lain Dinas Perizinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta RS Jogja. Ketiga SKPD tersebut dinilai pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah memenuhi standar pelayanan terbaik.

Kabar tersebut diperoleh oleh Pemkot Jogja, setelah kemarin (15/10), kementerian di bawah Yuddy Chrisnandi itu menurunkan tim untuk menilai ketiga SKPD tersebut. Kini, ketiga SKPD itu sedang digodog tim dari Kemen PAN-RB.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Kris Sarjono Sutejo membenarkan kabar baik itu. Menurutnya, ketiga SKPD tersebut bakal menjadi role model nasional dalam pelayanan publik, karena persyaratan yang dibutuhkan dalam pelayanan publik sudah terpenuhi. "Bahkan ketiganya sudah berada di atas standar yang ditetapkan," katanya.

Ia mencontohkan, pada Dinas Perizinan, mulai standar pelayanan publik (SPP), standar operating procedure (SOP) hingga indeks kepuasan masyarakat (IKM) sudah terpenuhi. "Apalagi untuk perizinan di kitas menggunakan dinas bukan badan, dan itu hanya ada satu di sini ini (Kota Jogja)," tandasnya.

Sebenarnya, konsep SKPD Dinzin di Kota Jogja ini sudah diterapkan beberapa kota dan kabupaten. Mereka meniru, dengan datang langsung untuk mempelajari sistem pelayanan satu atap tersebut. "Tapi hasilnya ternyata sudah cukup memadai," ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi oleh tim pelayanan publik dari Kemen PAN-RB, sekaligus untuk memastikan implementasi inovasi yang dicanangkan SKPD yang dinilai. Misalnya, Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper) yang menjadi inovasi dari Dinas Perizinan.

Kemudian pengurusan akta secara daring (online) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian klinik sore dan pendaftaran melalui barcode atau pesan singkat di RS Jogja. "Jadi masyarakat bisa

dilayani dengan cepat, tidak perlu menunggu lama," katanya.

Proyek percontohan terhadap ketiga SKPD itu, awalnya dari Menteri Yuddy Chrisnandi pada 26 Agustus lalu. Ia tiba-tiba menghampiri Dinzin Kota Jogja usai landing di Bandara Adi Sutjipto untuk acara lain. Kala itu, Yuddy mengaku layanan yang di Dinzin Kota Jogja sudah memuaskan.

Yuddy pun berinisiatif untuk menetapkan Dinzin tersebut sebagai role model pelayanan satu atap. Sebab yang di pemerintah pusat saja sampai saat ini belum terealisasi. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia diharapkan bisa mengadopsi sistem di Dinzin Kota Jogja, meski tidak harus sama, setidaknya bisa melakukan inovasi menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Wali Kota Haryadi Suyuti menyambut positif dengan hal tersebut. HS, panggilan akrabnya, menegaskan, pelayanan yang diberikan di Dinas Perizinan didasarkan pada aturan-aturan yang sudah dibuat. "Dasarnya adalah kepastian. Itu yang paling penting," pesan HS. (eri/jko/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Dinas Perizinan			
4. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005